

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK Jawa Tengah

Halaman 5 dan 10

## Pengelolaan DD di Kudus Dinilai Bagus



FOTO: BURHANUDDIN FIRDAUS/JATENG POS

**SOSIALISASI:** Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jateng Ayub Amali menyosialisasikan pengelolaan DD di Pendapa Kabupaten Kudus, kemarin lusa.

**KUDUS** - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menilai, pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Kudus, saat ini masih tergolong bagus. Sebab belum ada temuan penyelewengan anggaran, yang mengharuskan di proses secara hukum. Kepala Perwakilan BPK

► Baca **PENGELOLAAN ... 10**

Provinsi Jateng Ayub Amali mengatakan, program DD sudah berlangsung beberapa tahun, tentunya sudah ada perbaikan. Sampai saat ini belum ada temuan, yang mengarah pengelolaan DD di Kudus kurang baik. Sehingga layak mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "WTP ini menjadi bukti, Kabupaten Kudus mampu menyajikan laporan keuangan dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah," kata Ayub usai saat menghadiri Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR, dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Pendapa Kabupaten Kudus, kemarin lusa.

Dia menjelaskan, jika laporan keuangan desa terjadi masalah, tentunya opini WTP yang selama ini diperoleh Pemkab Kudus akan turun. Dia mengakui, dalam melakukan pengawasan laporan keuangan pemerintah desa, BPK tidak bisa mengawasi secara langsung dan menyeluruh karena keterbatasan personal. Meski demikian, kata Ayub, tim audit BPK tetap melakukan pengawasan, terkait laporan keuangan yang disusun dengan baik dan lengkap. Karena tidak menutup kemungkinan, terjadinya penyalahgunaan keuangan desa. Kalau hal itu sudah teridentifikasi, tentu tim audit BPK akan menelusuri permasalahan tersebut.

"Tim audit BPK sudah berpengalaman, dan biasanya memang memiliki kecurigaan terhadap hal-hal yang menyimpang," tandasnya. Apabila administrasinya tidak lengkap, lanjutnya, dana desa yang sudah ditransfer ke rekening pemdes, harus dikembalikan terlebih dahulu ke kas daerah. Dalam pelaporan keuangan desa, memang dinilai terlalu rumit. Namun sudah ada usulan untuk lebih disederhanakan. Mengingat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa belum ada pemerataan. Meski demikian, Ayub mengimbau kepada kepala desa dan jajarannya, tetap mengikuti aturan

yang berlaku. Aturan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Keuangan. "Saat ini sudah ada upaya pemerintah mengevaluasi aturan, untuk lebih disederhanakan dan disempurnakan. Usulan ini juga sudah sampai ke presiden," tandasnya. Dia menambahkan, selain aturan pelaporan, pemerintah juga akan mengevaluasi, terkait alokasi anggaran yang diterima masing-masing desa. Sebab anggaran yang diterima tidak disamaratakan, karena masing-masing desa memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda-beda.

"Ada desa yang dengan jumlah kepala keluarga sedikit, justru alokasi dana yang diterima sama dengan desa lain yang memiliki jumlah keluarga yang lebih banyak," pungkasnya. (han/lis)